

ABSTRAK

PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ADELIA ANGGRAINI

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam mengawasi kegiatan perdagangan di Provinsi Lampung. Pengawasan ini terlaksana dengan didasari oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pelaksanaan pengawasan diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. Penelitian ini akan membahas dan mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas di Provinsi Lampung serta hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan jenis deskriptif permasalahan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dimanfaatkan ialah data primer yang diperoleh dari tempat dimana dilakukan penelitian dengan data sekunder yang mencakup fakta hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, setiap data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa peraturan hukum tentang larangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Faktor penyebab masuknya pakaian bekas impor di Provinsi Lampung disebabkan oleh pengawasan di wilayah Pelabuhan yang kurang ketat, serta para pelaku usaha yang mendistribusikan pakaian bekas impor tersebut secara sedikit demi sedikit. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas tersebut. Upaya yang dilakukan Disperindag Provinsi Lampung ialah dengan melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Pelaku usaha yang melanggar teguran akan dikenakan sanksi berupa penyegehan terhadap barang yang diperjualbelikan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pakaian Bekas, Impor

ABSTRACT

SUPERVISION OF IMPORTS OF USED CLOTHES BY THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE OF LAMPUNG PROVINCE

By

ADELIA ANGGRAINI

The Lampung Province Industry and Trade Office is a government agency that plays an active role in supervising trade activities in Lampung Province. This supervision is carried out based on Law Number 7 of 2014 concerning trade, and the implementation of supervision is regulated by the Minister of Trade Regulation Number 36 of 2018 concerning the implementation of supervision of trade activities. This research will discuss and examine the implementation of used clothes import supervision in Lampung Province and the obstacles that occur in the implementation process.

The research method used is empirical normative, with a descriptive type of problem solved using an empiric juridic approach. The study utilizes primary data from the research site, supplemented by secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal facts. All the data is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that legal regulations regarding the prohibition of the circulation of imported used clothing in Indonesia are regulated in Article 47 of Law Number 7 of 2014 concerning trade. Factors causing the entry of imported used clothes into Lampung Province are less strict supervision in the port area as well as business actors who distribute imported used clothes little by little. In addition, there is a lack of public awareness of the impact that will be caused by wearing the used clothes. The effort made by the Lampung Province Department is to conduct direct monitoring of the location. Business actors who violate the warning will be subject to sanctions in the form of sealing the goods being traded.

Keyword: Supervision, Used Clothes, Import